

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik menurut Madjid (2019) adalah proses menentukan, mengukur, mencatat, dan mengungkapkan interaksi komersial (keuangan) suatu bisnis atau administrasi, organisasi non-pemerintah, dan lainnya, untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak untuk pengambilan keputusan ekonomi. Badan pemerintah adalah entitas sektor publik yang paling dikenal. Seperti semua organisasi publik lainnya, badan pemerintah akan berfungsi sesuai dengan anggaran mereka. Oleh karena itu, ketika mempelajari akuntansi sektor publik di Indonesia, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Margono (2010) menegaskan bahwa organisasi publik—seperti partai politik, pemerintah daerah dan nasional, organisasi non-pemerintah (LSM), dan lainnya—menggunakan akuntansi sektor publik. Organisasi publik adalah organisasi yang terutama bergantung pada sumbangan masyarakat untuk membiayai operasional mereka dan bekerja untuk kepentingan masyarakat umum. Sektor pemerintah telah menjadi fokus utama diskusi akuntansi sektor publik sampai saat ini, dan sektor publik sering kali identik dengan sektor pemerintah dalam sejumlah publikasi akuntansi sektor publik.

Menurut Bharata & Priyono (2019) tujuan akuntansi sektor publik bukanlah untuk menghasilkan uang. Berdasarkan uraian mengenai Badan Layanan Umum, yaitu suatu organisasi pemerintah yang dibentuk untuk melayani masyarakat dengan cara menyediakan jasa atau barang yang dijual meskipun menyelenggarakan perolehan pendapatan serta berdasarkan asas produktivitas hingga efektivitas dalam kegiatannya, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum ialah perusahaan pembiayaan sektor publik.

2. Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2013) akuntansi keuangan daerah adalah proses di mana aktivitas keuangan dari suatu provinsi, distrik, atau kota diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan. Informasi yang dikumpulkan kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat untuk membuat pilihan moneter. Menurut Ummah (2019) Setelah restrukturisasi, akuntansi keuangan daerah telah menarik perhatian signifikan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang akuntansi sektor publik. Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah untuk menyediakan data keuangan yang lengkap, andal, dan akurat sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pencapaian keuangan masa lalu, dan yang akan memberdayakan pihak luar untuk membuat keputusan keuangan berikutnya tentang pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditor, dan donatur; analis ekonomi dan pengamat pemerintahan lokal; masyarakat umum; pemerintah daerah lainnya; serta pemerintah pusat adalah pihak eksternal dari pemerintah daerah yang membutuhkan informasi yang diproduksi oleh akuntansi keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah melayani tujuan ini dengan memberikan informasi tentang arus kas pemerintah, aset, liabilitas, ekuitas dana, pembiayaan, pendapatan, dan pengeluaran.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mencakup beberapa kegiatan, seperti pengumpulan data, penyimpanan, analisis, dan pelaporan keuangan, untuk menentukan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik dilakukan secara individual maupun dengan bantuan program perangkat lunak, tujuan dari sistem ini adalah untuk menghasilkan data dalam bentuk laporan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, sistem akuntansi keuangan daerah dibagi menjadi beberapa tahap:

- 1) Tahap pertama dalam mengembangkan sistem akuntansi untuk kotamadya adalah memahami proses bisnis, khususnya yang berkaitan dengan siklus pengawasan moneter lokal. Tim dokumentasi menentukan aturan apa yang perlu dikembangkan berdasarkan periode waktu tertentu.

- 2) Mengidentifikasi Pihak-Pihak yang Relevan Setelah identifikasi prosedur, pihak-pihak yang relevan untuk setiap prosedur diidentifikasi. Agar proses dapat menghasilkan hasil yang diinginkan, setiap pihak memainkan peran tertentu.
- 3) Menemukan Dokumen yang Relevan melalui prosedur dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memanfaatkannya adalah langkah selanjutnya, setelah prosedur dan pihak-pihak terkait telah diidentifikasi. Dokumen yang cocok untuk digunakan sebagai dokumen sumber untuk pencatatan jurnal dipilih dari semua bahan ini.
- 4) Mengidentifikasi Jurnal Standar, tim penyusun memeriksa SAP dan kebijakan akuntansi yang terkait untuk setiap operasi yang ditentukan. Tim penyusun memilih jurnal debit dan kredit mana yang akan digunakan untuk pencatatan berdasarkan tinjauan ini.
- 5) Langkah-langkah teknis adalah tahap terakhir dalam persiapan SAPD. Alur sistem akuntansi direpresentasikan oleh fase teknis, yang menguraikan siapa yang bertanggung jawab untuk menerapkan sistem, dokumen yang diperlukan dan cara penanganan dokumen terkait oleh orang-orang. Lebih jauh, setiap proses atau kegiatan yang memerlukan dokumentasi mencakup entri pembukuan sebagai ilustrasi atau gaya pencatatan. (Kualitas & Keuangan, 2019)

Menurut Suryo Pratolo & Rizal Yaya (2016) keuangan daerah harus dikelola dengan tepat sesuai dengan konsep yang luas untuk mencapai tujuan pemerintah. Prinsip-prinsip ini termasuk:

- 1) Keuangan daerah dikelola dengan cara yang bertanggung jawab, transparan, dan teratur sambil mematuhi persyaratan hukum dan regulasi serta mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kesopanan, dan manfaat bagi masyarakat.
- 2) Struktur terpusat yang mendukung administrasi keuangan daerah diwakili oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap

triwulan melalui peraturan daerah provinsi.

Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu mencakup administrasi kota, kabupaten, dan provinsi, adalah pengelolaan dana di tingkat lokal. Ini dibagi menjadi beberapa fase, khususnya:

- 1) Penyusunan
- 2) Penerapan
- 3) Pengelolaan
- 4) Pemberitahuan
- 5) Tanggung Jawab
- 6) Pemeriksaan Keuangan Daerah

3. Surat Pertanggung Jawaban

Menurut Bastian (2007) SPJ adalah surat yang mempertanggungjawabkan pengeluaran maupun buku besar pembantu pengeluaran kas, yang didukung oleh bukti pengeluaran. Singkatnya, surat pertanggungjawaban pengeluaran adalah dokumen yang merinci bagaimana dana digunakan untuk operasi suatu organisasi atau institusi dan didukung oleh bukti pengeluaran yang sah. Yang et al. (2026) menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ) adalah dokumen yang merinci transaksi melalui penggunaan catatan, kwitansi, dan bukti transaksi lainnya yang menjelaskan bagaimana uang di bawah pengelolaan Bendahara Pengeluaran digunakan.

Laporan terorganisir tentang bagaimana anggaran digunakan untuk suatu kegiatan disebut Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan SPJ berikutnya dan memiliki signifikansi evaluatif terkait dengan hasil dan proses keseluruhan kegiatan tersebut. Kegiatan yang telah diselesaikan dijelaskan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pada dasarnya, SPJ adalah cerminan dari tanggung jawab dan keterbukaan yang melekat dalam birokrasi pemerintahan. Tugasnya mencakup penilaian terhadap kinerja yang dicapai dan bertindak sebagai sarana akuntabilitas untuk pengeluaran (belanja).

SPJ memiliki fungsi sebagai alat evaluasi terhadap seluruh proses dan hasil kegiatan, 11 serta makalah ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk membantu Pernyataan Keberlanjutan mendatang menjadi berstandar lebih baik.. (Apriliani et al., 2024)

4. Sumber Daya Manusia

Menurut Sijabat & Lestary S (2022) salah satu elemen yang berkontribusi untuk meningkatkan taraf pelaporan keuangan adalah sumber daya manusia. Sebuah organisasi atau bisnis memerlukan sumber daya manusia yang terampil yang mampu menggunakan teknologi penerangan mutakhir untuk menyusun laporan keuangan berkualitas tinggi. Baik di lembaga pemerintah maupun perusahaan lain seperti manufaktur, perdagangan, atau layanan, sumber daya manusia adalah salah satu komponen terpenting yang terkait erat dengan sebuah perusahaan. Sumber daya manusia yang kompeten, didukung oleh pendidikan akuntansi dan keahlian di industri keuangan, sangat penting bagi perusahaan untuk mencapai manajemen keuangan yang sehat. Untuk memahami akuntansi yang tepat, penting untuk menerapkan sistem akuntansi yang terkini. Standar laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu bisnis akan sangat dipengaruhi oleh kesalahan pekerja atau kekeliruan dalam penyusunannya.

Kompetensi adalah kapasitas untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas menggunakan informasi dan keterampilan yang didukung oleh etos kerja yang dibutuhkan untuk posisi tersebut. Kompetensi dengan demikian, menunjukkan pengetahuan atau keterampilan yang profesional di sektor tertentu. Pada Widyastuti et al (2022) Keahlian sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan mencakup elemen berdasarkan riwayat pekerjaan, prestasi akademik, serta watak sesuai dengan norma. Ini meningkatkan kemampuan mereka dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang komparatif, dapat diandalkan, penting, serta mudah dipahami. Karena mereka berpartisipasi aktif dalam operasi dan proses pengambilan keputusan suatu entitas, sumber daya manusia sangat penting bagi organisasi. Keputusan terbaik yang dihasilkan oleh sumber daya manusia yang menunjukkan kinerja dan kapasitas individu dalam memecahkan masalah dalam parameter peran dan bidang keahlian mereka. Namun, ini juga terkait erat dengan penilaian yang cerdas dan tekad yang digunakan untuk menugaskan seseorang pada pekerjaan dan posisi tertentu. Ini

menunjukkan jika kualitas laporan keuangan pemerintah daerah meningkat seiring dengan 12 meningkatkan keterampilan karyawan, yang menghasilkan pelaporan keuangan dengan lebih baik. (Adhillah, 2022)

Menurut Oktaviyanti et al., (2017) sumber daya manusia yang terampil diperlukan untuk menyiapkan laporan keuangan dengan standar yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi. Penting untuk mempertimbangkan kemampuan pejabat pemerintah saat membuat laporan keuangan. Kesalahan laporan keuangan adalah akibat dari ketidakmampuan sumber daya manusia untuk memahami dan mengenali penggunaan akuntansi. Mengingat kesalahan yang terjadi selama proses pembuatan laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia harus ditingkatkan dalam segala hal.

5. Pengendalian Internal

Menurut (Hendra Hafid Permadi et al., 2024) proses pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan tingkat kepastian yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang, serta efektivitas dan produktivitas operasional. Pengendalian internal dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan lain dalam suatu organisasi. Tujuan pengendalian internal adalah untuk meminimalkan kesalahan dan ketidakkonsistenan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Memeriksa dokumen dan mengevaluasi berbagai operasi bisnis adalah contoh dari pengendalian internal, yang membantu manajemen dalam mempertahankan kendali organisasi.

Menurut Sijabat & Lestary S (2022) Elemen lain yang membantu meningkatkan Standar pelaporan keuangan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal. Kemanjuran sistem pengawasan internal menentukan bagaimana temuan direncanakan dan dilaporkan untuk dievaluasi oleh komite. Sebagai penyedia pengetahuan yang netral mengenai berbagai operasi organisasi, sistem pengendalian internal membantu dalam membuat keputusan yang tepat dan tidak biasa.

Menurut Mukti (2019) implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Provinsi Jawa Tengah, yang dilakukan oleh BPKP dan Evaluasi Penerapan Sistem..., Kenar Lituhaty Ratna Maya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2025 Inspektorat 13 provinsi, adalah salah satu bentuk pengawasan internal di

pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah didasarkan pada konsep pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), yang menggunakan manajemen risiko terintegrasi, pengendalian internal, dan pencegahan penipuan untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja organisasi. Prinsip inti COSO adalah bahwa pengendalian internal yang efektif dan manajemen risiko sangat penting untuk kinerja jangka panjang suatu organisasi. Semua Menteri, Kepala Instansi, Gubernur, dan Bupati atau Walikota harus mengendalikan pelaksanaan sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

Diharapkan bahwa pengendalian internal akan mampu melindungi dari kecurangan dan sabotase sistem, serta mencegah atau mengidentifikasi kesalahan dalam proses akuntansi. Pengendalian internal diterapkan untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan mematuhi prinsip manajemen yang teratur, yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Pengajuan laporan keuangan yang tepat waktu adalah bagaimana pendekatan manajemen yang teratur ini diterapkan. (Ayem & Husen, 2017)